

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana.
- Dunn, Wiliam N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Islamy, M. Irfan. (2004). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Johara, T. Jayanta dan Pramandika. (2006). *Pembangunan Desa dalam Perencanaan*. Bandung. ITB.
- Koentjaraningrat. (1982). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Mar'at. (1982). *Sikap Manusia: Perubahan dan Pengukuran*. Bandung. Ghalia Indonesia.
- Miles, Matthew B dan A Michael Huberman. (1992). *Analisa Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Nasution S. (1996). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta. Bumi Akasra.
- Nugroho Riant D. (2003). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Robbins Stephen P. (2006). *Prilaku Organisasi*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: PT. Indeks.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Singarimbun Masri dan Effendi Sofyan. (1986). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3SE.
- Sreers, Ricard M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Erlangga.
- Surachmad, Winarno. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Penerbit Transito.
- Sutopo, H.B. (2002). *Penelitian Kualitatif*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Umar, Husein.(2001). *Riset Sumer Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahab, Solichin Abdul. (1997). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, S. Dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersera.

Widjaja, H.A.W. (2003). *Penyelengraan Otonomi Daerah*. Jakarta. Graha Ilmu.

Winarno Budi. (2007). *Kebijakn Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Jurnal:

Monica, Euodia. (2013). *Inventasi Cina Dalam Bidang Infrastruktur Di Jawa Barat, Indonesia*. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1, No.2, 486-489.

Rohaman, Nanang. (2010). *Impelementasi Kebijakan Pembangunan Desa Dampaknya terhadap Koordinasi UPTD dalam Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa dan Efektivitas Pembangunan Desa*. *Jurnal Pembangunan Desa dan Kebijakan Publik*, Vol.02,No.01, 30-36.

Perundang-undangan:

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.